

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kebijakan merupakan susunan konsep dan prinsip yang digunakan sebagai pedoman dan dasar perencanaan dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan, kepemimpinan, dan sebuah tindakan. Istilah tersebut dapat dilaksanakan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok swasta, serta individu. Kebijakan memiliki perbedaan dengan aturan dan hukum. Jika undang-undang bisa digunakan untuk menegakkan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu undang-undang yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya mengarahkan tindakan yang bisa memperoleh hasil yang dicita-citakan (Indar Susanto, 2012).

Menindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Bupati Ponorogo terkait pelaksanaan program kegiatan RT yang mana di dalamnya terdapat sebuah Peraturan Bupati Ponorogo nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Kabupaten Ponorogo di era kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Lisdyarita terus melaksanakan berbagai program unggulan yang sesuai dengan Visi menuju Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah, dan Taqwa) (Kominfo Ponorogo, 2021). Salah satunya ialah bantuan Program Kegiatan RT yang mana setiap RT mendapatkan 10 juta selama Satu Tahun, akan tetapi dikemas dalam bentuk sebuah program kegiatan RT. Program-program tersebut memiliki maksud dan tujuan dibuat berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat Kabupaten Ponorogo seperti saat musim penghujan banyak genangan air, produksi sampah yang meningkat setiap tahunnya, memulihkan perekonomian masyarakat setelah adanya pandemi Covid-19, kemajuan teknologi dan informasi di masyarakat RT, kesejahteraan pengurus RT, pemberdayaan masyarakat RT. Target adanya program kegiatan RT bisa untuk mengatasi permasalahan di masyarakat dan mendorong kemandirian dan pembangunan di tingkat bawah.

Surat Edaran (SE) Bupati yang sudah terbit tentang Penggunaan Anggaran Kegiatan Rukun Tetangga, Pemerintah Kabupaten Ponorogo memberikan dana sebesar Rp 10 juta per tahun untuk seluruh Rukun Tetangga di Kabupaten Ponorogo yang berjumlah 6.869 Rukun Tetangga (RT). Dana tersebut dialokasikan dengan program yang telah dicanangkan oleh Pemkab Ponorogo yang termuat dalam Surat Edaran terdapat rincian program-program yang akan dijalankan. Program tersebut antara lain dari pembuatan sumur resapan atau yang di sebut biopori, pengelolaan sampah di lingkup RT, penyediaan jaringan *Wireless Fidelity* (Wifi), penguatan ekonomi perempuan, tunjangan BPJS dan insentif pengurus RT, penanaman obat keluarga dan biaya rebug warga (Ponorogo, 2022). Namun dalam proses pencairan dana tersebut dilakukan oleh pihak Desa karena nantinya uang bantuan tersebut ditransfer lewat kas Desa, tetapi strategi pengelolaan dana sangat dibutuhkan agar pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Program Kegiatan RT sudah dilaksanakan pada tahun 2022 bulan maret diseluruh RT yang ada di Kabupaten Ponorogo, namun dalam pelaksanaannya kurang terlaksana dengan baik.

Dana yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) Ponorogo Tahun 2022 yang sudah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2022. APBD pada dasarnya ialah sebuah bagian kebijakan yang digunakan untuk alat memperbaiki pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Maka dari itu DPRD dan Pemerintah Daerah harus melakukan upaya yang nyata dan tersusun rapi guna menghasilkan APBD yang dapat bermanfaat bagi kebutuhan rill masyarakat maupun potensi daerahnya masing-masing, serta pula memenuhi tuntutan terciptanya pemerintahan daerah yang anggarannya mengarah pada kepentingan masyarakat (Azahra & Lubis, 2021).

Dari gambaran di atas memperlihatkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah memiliki peranan yang sangat penting terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana untuk

mensejahterakan masyarakat ialah hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. jika tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang sesuai peraturan yang ada juga perlu pengawasan yang dibutuhkan untuk mengawasi program-program yang disusun agar terlaksana sesuai sasaran, jika tidak di barengi dengan pengawas ditakutkan nantinya tidak sesuai dengan program-program yang sudah disusun.

Secara keseluruhan peneliti memilih beberapa rujukan yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah *penelitian pertama* yang ditulis oleh Budi & Mawardi (2016) dalam sebuah penelitian yang berjudul *Pemanfaatan Lubang Resapan Biopori Dalam Mengatasi Genangan Air, Banjir dan Kekeringan di Kecamatan Banyumanik* yang terdapat pada Jurnal Polines. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya secara observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permukaan jalan yang ada di desa Tanjungsari Kecamatan Banyumanik Semarang berupa paving dan jalan aspal. Pada jalan masuk desa kondisi permukaan jalan paling rendah dengan jalan-jalan yang lainnya dan saluran pembuangan air yang ada tidak mencukupi jika terjadi hujan yang besar, air hujan akan menggenangi jalan sulit mengalir dan meresap ke dalam tanah yang dapat menyebabkan banjir. Untuk mengatasi hal tersebut dibuatkan tempat resapan air ke dalam tanah yaitu dengan membuat lubang resapan air yang disebut Lubang Resapan Biopori (LRB). Biopori yang memiliki kelebihan antara lain biayanya lebih murah, pembuatannya mudah dan bisa dibuat di lahan yang sempit.

*Penelitian Kedua* yang ditulis oleh Anis & Ana Anggorowati Dwi (2019) dalam sebuah penelitian ini yang berjudul *Pengolahan Sampah Terpadu Desa Karangates Untuk Mencapai Zero Waste* yang terdapat pada Jurnal Industri inovatif Teknik Industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi untuk memperoleh data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan sampah pada lingkungan sekitar, maka dari itu direncanakan pengelolaan sampah dengan sistem 3 R yaitu : *Reduce* (Mengurangi), *Reuse* (Menggunakan Kembali), dan *Recycle*

(Mendaur Ulang), Dengan adanya hal tersebut pengolahan sampah terpadu di Desa Karangates untuk mencapai *Zero Waste*. Dari hasil yang sudah dilakukan jenis pengolahan sampah ibu rumah tangga lebih banyak mendominasi kegiatan pengolahan sampah, terutama pengolahan sampah organik yang kemudian menjadi kompos, Dengan mengembangkan pola pikir masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah sebagai peningkatan ekonomi dan dapat mengurangi kerusakan alam.

*Penelitian Ketiga* yang ditulis oleh Saptatiningsih et al., (2015) dalam sebuah penelitian ini yang berjudul *Pemberdayaan Perempuan Desa Untuk Mengurangi Kemiskinan* yang terdapat pada repository Universitas PGRI Yogyakarta Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi partisipasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa melalui pemberdayaan masyarakat perempuan mempunyai kesadaran akan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya dan posisi budayanya, sedangkan pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi lokal dapat memberi motivasi untuk membentuk usaha ekonomi produktif.

*Penelitian Keempat* yang ditulis oleh Rosdiyani (2020) dalam sebuah penelitian ini yang berjudul *Pemasangan Jaringan Internet Berbasis Wireless Fidelity (WIFI) Di Kampung Wangun Cipurut* yang terdapat pada jurnal ABDIKARYA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa internet menjadikan suatu kebutuhan dasar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di era digital saat ini. Dengan adanya internet masuk ke kampung dapat membantu masyarakat dalam berkomunikasi, memasarkan produk UMKM yang ada di kampung yang secara umum potensi yang ada di Kampung Wangun Cipurut Desa Batukuwung Kecamatan Padarincang kabupaten serang ini cukup besar dari segi keindahan alam maupun banyak pengrajin melinjo sehingga pengembangan kapasitas jaringan internet sangat diperlukan untuk mengenalkan potensi yang dimiliki kampung tersebut.

*Penelitian Kelima* yang di tulis oleh Husni Zelika (2022) dalam sebuah penelitian ini yang berjudul *Implementasi Program Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Di Kota Pekanbaru* yang terdapat pada Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, selain itu penelitian ini menggunakan teori Korten tentang implementasi yaitu kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi program penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Kota dalam pelaksanaan belum maksimal. Kemudian terdapat faktor penghambat dalam implementasi program penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang program PBI Jaminan Kesehatan, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, dan kinerja organisasi pelaksana yang kurang optimal.

*Penelitian Keenam* yang ditulis oleh Sukmawati & Alam (2021) dalam sebuah penelitian ini yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makasar Mengenai Pemberian Insentif Kepada Ketua RT dan RW* yang terdapat pada jurnal SEIKO. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah dapat memberikan dampak yang diharapkan dari perwali Kota Makasar No3 tahun 2016 tentang pemberian insentif kepada RT dan RW sekota Makasar khususnya Kecamatan Rappocini adalah penerapan pelayanan yang mampu bersinergi secara positif antara masyarakat dengan aparaturn pemerintah terkecil RT/RW dan pemberian insentif bagi RT/RW sesuai dengan kebijakan yang sudah ada.

*Penelitian ketujuh* yang ditulis oleh H. Nanda et al. (2018) dalam sebuah penelitian yang berjudul *Peningkatan Akurasi Data Kependudukan Melalui Pendampingan Pembuatan Buku Kependudukan Tingkat RT dan RW* yang terdapat pada jurnal SENADIMAS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah dengan adanya pembuatan form kependudukan pihak

perangkat desa, ketua RW DAN ketua RT merasa terbantu dengan adanya form kependudukan ini, sehingga dapat menghasilkan data kependudukan yang akurat dan terpercaya, dan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, maupun bahan evaluasi.

*Penelitian kedelapan* yang ditulis oleh Suhariyanti et al., (2021) dalam sebuah penelitian yang berjudul *Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Sosialisasi Penggunaan Tanaman Obat Keluarga (Toga) Di Lingkungan Bandung* yang terdapat pada jurnal AS-SYIFA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan kesehatan Masyarakat. penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik observasi, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya menanam TOGA meningkat, karena dapat digunakan sebagai pengobatan alami dan membudidayakan untuk menambahkan penghasilan warga sekitar.

Dari beberapa penelitian sebelumnya diatas dapat jelaskan bahwa terdapat persamaan dari objek yang akan dilakukan penelitian yaitu dari pembuatan biopori untuk mengatasi permasalahan luapan air hujan dan kekeringan, pengolahan sampah terpadu yang setiap tahun jumlah sampah meningkat dengan adanya pengolahan sampah dapat mengurangi jumlah sampah agar tidak menumpuk dan dapat memberikan penghasilan tambahan, memberdayakan masyarakat perempuan yang sesuai dengan potensi lokal dengan memberikan hibah bantuan untuk membentuk usaha ekonomi produktif, pemasangan jaringan internet berbasis *wifi* di kampung dengan adanya internet masuk ke desa atau kampung dapat membantu masyarakat untuk melakukan komunikasi jarak jauh, memasarkan produk UMKM dan kebutuhan lainnya, Program bantuan iuran jaminan ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan keselamatan pekerjaan pengurus RT, pemberian insentif ketua RT dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat melaksanakan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap warganya, peningkatan akurasi data kependudukan dan membuat pembukuan kependudukan di tingkat RT memakai form kependudukan dengan adanya hal tersebut pihak perangkat desa, dari pihak

RT merasa terbantu dengan adanya data terbaru yang bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil sebuah kebijakan, peningkatan kesehatan masyarakat dengan menanam obat keluarga (TOGA) bukan hanya sebagai obat alami tetapi bisa juga dibudidayakan untuk menambah penghasilan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu fokus dalam penelitian sebelumnya adalah fungsi dari program tersebut untuk mengatasi permasalahan yang ada, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah terkait siapa yang merumuskan sebuah program kegiatan RT yang terdapat di Kabupaten Ponorogo dan pelaksanaan program tersebut seluruh RT di Kabupaten Ponorogo, Karena dalam kebijakan tersebut seluruh RT yang ada di Ponorogo mendapatkan bantuan sebesar 10 juta per RT yang mana karakteristik lokasi RT yang ada di Desa dan di Perkotaan berbeda, atau kebijakan tersebut memang dibuat untuk kepentingan politis atau kebijakan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di RT.

Berdasarkan semua uraian di atas, penulis tertarik melakukan kajian dan penelitian tentang permasalahan sebagaimana yang dirumuskan dalam judul penelitian sebagai berikut :

**“Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tentang Program Kegiatan Rukun Tetangga (Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor : 140/913/405.14/2022) ”**

## **B. PERTANYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka di ambil fokus pertanyaan yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kebijakan Pemkab Ponorogo tentang program Kegiatan RT. Apa yang menjadi alasan atau dasar dan tujuannya?
2. Bagaimana pelaksanaan dan kendala di masing-masing RT ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat dijelaskan tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui alasan atau dasar tujuan adanya Program Kegiatan RT.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan program kegiatan RT di masing-masing RT serta kendala dalam pelaksanaan program kegiatan RT.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun secara langsung yang terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo tentang program Kegiatan RT untuk mengatasi permasalahan di lingkup RT dan pengembangan sarana dan prasarana di lingkup RT.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran pemikiran terhadap Pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait program kegiatan RT dalam hal Mengatasi permasalahan yang aterdapat pada masyarakat desa khususnya di lingkup RT.

### **E. PENEGASAN ISTILAH**

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu adanya penekanan beberapa kata kunci yang perlu dijelaskan makna dan pembahasan perlu di jelaskan.

1. Kebijakan

kebijakan ialah sebuah aktivitas yang dibuat oleh perorangan, kelompok, atau pemerintah dalam lingkup tertentu yang munculnya sebuah hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan), maka kebijakan tersebut dibuat agar

bertujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan bersama (Agustino, 2017).

## 2. Otonomi daerah

Otonomi Daerah adalah penyerahan hak dan wewenang tertentu oleh satuan organisasi yang berada di atasnya kepada satuan organisasi yang berada di bawahnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi dan kemampuannya untuk mencapai tujuan dengan baik (Marit, 2021).

## 3. Program Kegiatan

Program Kegiatan adalah rangkaian rencana yang dibuat untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Menyusun program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk melaksanakan suatu program kegiatan diperlukan adanya kesepakatan dari beberapa pihak.

## 4. Rukun Tetangga (RT)

Rukun Tetangga atau yang sering di singkat (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Desa/Kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga memiliki peran untuk perantara dalam menyampaikan kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah maupun Pusat, selain itu ialah pihak pertama yang menampung aspirasi dari masyarakat.

## F. LANDASAN TEORI

### 1. Kebijakan

Pada dasarnya kebijakan adalah serangkaian pilihan atau opsi yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan ialah hasil analisis yang dilakukan terhadap berbagai pilihan atau opsi yang tertuju pada sebuah pengambilan terkait pilihan terbaik. Pengertian kebijakan menurut Kartasasmita dalam Misna (2015) adalah usaha untuk mempelajari dan mengartikan apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya, apa pengaruh dan dampak dari sebuah kebijakan. Sedangkan menurut Thomas R. Dye (1978) dalam

Misna (2015) bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga unsur antara lain adalah : (1) kebijakan publik, (2) pelaku kebijakan, (3) lingkungan kebijakan. Kebijakan publik disusun bukan tanpa tujuan dan maksud, kebijakan publik disusun guna memecahkan sebuah permasalahan yang terdapat di masyarakat. Menurut Carl Friedrich (1969) dalam Manongga (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu kegiatan yang tertuju pada suatu rencana yang usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk tercapainya tujuan yang diinginkan. Konsep ini adalah aksi yang diusulkan sambari mencari kesempatan untuk melaksanakan tujuan yang diinginkan.

Menurut Islamy dalam Herdiana (2018) ada beberapa hal penting dalam kebijakan, yaitu: Pertama, kebijakan publik dalam bentuk awalnya berwujud penetapan tindakan-tindakan pemerintah. Kedua, suatu kebijakan publik tidak cukup hanya disampaikan akan tetapi perlu diimplementasikan dalam bentuk nyata. Ketiga, bahwa kebijakan publik digunakan untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Keempat, bahwa kebijakan publik pada dasarnya pada kepentingan seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut William N. Dunn (1994) analisis kebijakan adalah aktivitas berfikir yang cerdas dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses sebuah kebijakan. Adapun tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan menurut William N. Dunn (1994) yaitu :

a. Tahap Perumusan Masalah

Masalah kebijakan ialah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk selanjutnya diperbaiki atau dicapai melalui sebuah tindakan.

b. Tahap Peramalan Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke perumusan kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada.

c. Tahapan Rekomendasi Kebijakan

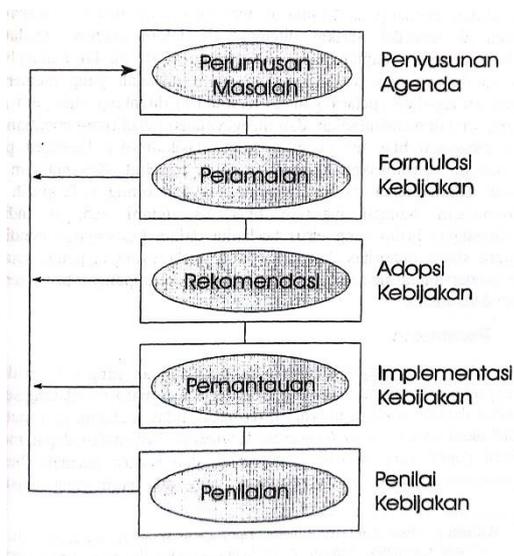
Rekomendasi membantu perkiraan tingkat resiko dan ketidakpastian, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan alternatif sebuah kebijakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang di ambil dengan support dari mayoritas para pembuat kebijakan.

d. Tahapan Pemantauan Kebijakan

Pemantauan (*monitoring*) menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang di ambil sebelumnya. Hal ini membantu pengambil kebijakan pada tahap Implementasi kebijakan, Suatu program kebijakan hanya menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan.

e. Tahapan Penilaian Kebijakan

Suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil melalui bagian pemeriksa untuk menentukan apakah para pembuat kebijakan sudah melaksanakan persyaratan sesuai peraturan dalam menyusun kebijakan dan pencapaian dari penyusunan kebijakan, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan.



Gambar 1.1. Tahapan dalam proses pembuatan kebijakan William N. Dunn (1994)

Berdasarkan teori di atas digunakan untuk mengungkapkan tentang analisis suatu kebijakan, dapat dikatakan bahwa kebijakan pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh yang berwenang dalam pembuatan kebijakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan beberapa proses atau tahapan agar dalam membuat suatu kebijakan dapat sesuai dengan tujuan awal untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan agar sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

Analisis kebijakan publik dalam peninjauan kinerja ini bermaksud untuk memberikan pengertian khusus tentang alur kebijakan dan pengembangannya, menerangkan hubungan sistem tata kelola pemerintahan, pemahaman kebijakan publik dan pengkajian kinerja, serta mengembangkan kerangka kerja dan menjelaskan ruang lingkup analisis kebijakan publik dalam peninjauan kinerja (Sendjaja, D. W. *et al*, 2015).

Sesuai dengan permasalahan yang akan di kaji oleh peneliti yaitu adanya sebuah kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait kegiatan Rukun Tetangga (RT) yang terdapat di Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini peneliti memakai teori analisis kebijakan, pada dasarnya teori analisis kebijakan terdiri dari Tahap Perumusan Masalah, Tahap Peramalan Kebijakan, Tahapan Rekomendasi

Kebijakan, Tahapan Pemantauan Kebijakan, Tahapan Penilaian Kebijakan. Dengan menganalisis sebuah kebijakan maka dapat mengetahui kebijakan tersebut memiliki manfaat terhadap masyarakat atau sebaliknya.

## G. DEFINISI OPERASIONAL

Sebelum menjelaskan terkait metodologi penelitian, terlebih dahulu perlu diartikan definisi operasional mengenai istilah-istilah kunci untuk menegaskan, memberikan petunjuk, dan mengurangi kesalahan pahaman. Beberapa istilah kunci yang dipandang penting untuk diartikan dalam penelitian ini menjelaskan pelaksanaan sebuah kebijakan yaitu terkait analisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo tentang program kegiatan RT (Rukun Tetangga). *Kebijakan* merupakan hasil diskusi mendalam tentang masalah-masalah saat ini untuk menemukan cara-cara alternatif mengatasi suatu masalah dalam suatu keputusan tentang alternatif terbaik. Ketika kebijakan dirumuskan serta memiliki tujuan atau sasaran yang ingin dicapai guna untuk mengetahui bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan. Sehingga penelitian ini terdapat sebuah dimensi sebagai berikut :

### A. Tahapan perumusan masalah

Tahapan perumusan masalah yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dari pihak Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang mana kebijakan tentang program kegiatan RT tersebut berdasarkan pada sebuah permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan masyarakat Kabupaten Ponorogo atau berdasarkan alasan dan tujuan yang lain.

### B. Proses peramalan sebuah Kebijakan

Sebuah proses selanjutnya dari tahap perumusan, proses peramalan sebuah kebijakan ini mencari pemecahan masalah di kalangan masyarakat Kabupaten Ponorogo yang diusulkan oleh para pembuat kebijakan serta juga dilakukan pengkajian atau peramalan sebuah kebijakan untuk mencapai dari sebuah tujuan kebijakan tersebut.

### C. Proses pengambilan keputusan

Dengan adanya proses ini dapat mengetahui tentang manfaat dan berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah di tetapkan pada proses peramalan sebuah kebijakan sebelum dilakukan penerapan sebuah kebijakan terkait dengan program kegiatan RT.

### D. Tahapan implementasi sebuah kebijakan

Implementasi sebuah kebijakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kebijakan program kegiatan RT yang meliputi :

- pembuatan biopori yang bertujuan untuk menampung air hujan untuk mengatasi masalah luapan air hujan dan kekeringan.
- Sampah terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah rumah tangga dan juga dapat mengurangi sampah yang dapat mencemari lingkungan.
- Satu RT satu kelompok yang bertujuan memberikan dukungan kepada masyarakat untuk memulihkan ekonominya melalui penguatan ekonomi perempuan di tingkat RT pasca pandemi covid – 19.
- Internet masuk RT yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat di tingkat RT guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
- Jaminan BPJS Ketenagakerjaan pengurus RT memastikan adanya keringaan bagi pengurus RT untuk memperoleh layanan kesehatan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- Insentif pengurus RT atau tambahan penghasilan bagi Ketua, Sekertaris, dan Bendahara RT dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kinerja RT dalam melaksanakan pembangunan di masyarakat, karena posisi RT menjadi sangat vital karena interaksi dengan masyarakat secara langsung.
- Rembug RT bertujuan melakukan pengisian atau pembaruan Data DTKS, Data Pendidikan, Data Kependudukan, dan Data Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Menanam Obat Keluarga bertujuan untuk menyediakan tanaman kunyit/jahe untuk di tanam di sekitar pekarangan rumah maupun lahan-lahan lainnya dan tersediannya tanaman obat bagi masyarakat untuk upaya menjaga kesehatan secara mandiri.

E. Tahapan evaluasi

Evaluasi Kebijakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan tentang program kegiatan RT serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk di sempurnakan kembali.



## H. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini ditetapkan karena peneliti menganggap bahwa karakteristik sangat cocok dengan permasalahan yang di kaji di dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo tentang program kegiatan RT yang menjadi fokus penelitian terkait latar belakang, alasan dan tujuan dari kebijakan tersebut serta pelaksanaan dan juga kendala dari penerapan program kegiatan RT tersebut. Menurut Rukin (2019) bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis. Penekanan proses penelitian dan penggunaan landasan teori dijalankan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu mendeskripsikan terjadinya suatu fenomena sesuai dengan kerangka teori yang dikembangkan selama penelitian berlangsung. Maka dari itu peneliti tidak perlu terhambat oleh kewajiban untuk mengikuti teori yang ada dalam berbagai literatur yang telah disusun sebelumnya. Karena bisa saja teori yang ada tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Setelah kategori yang berkaitan muncul, peneliti perlu kembali ke literatur teknis untuk menentukan apa yang sebenarnya dikatakan peneliti lain tentang kategori tersebut. Kegunaan lain dari sebuah literatur yaitu dapat menarik reaksi peneliti dalam mengartikan sebuah konsep dan hubungan yang teruji pada data. Berdasarkan literatur, peneliti bisa mengerti apakah konsep tersebut sesuai dengan situasi yang sedang diteliti (Nugrahani, F & Hum, 2014).

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat saat kegiatan penelitian dilaksanakan. Pemilihan lokasi penelitian bertujuan untuk memudahkan atau menjelaskan lokasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian terkait program kegiatan Rukun Tetangga (RT). Adapun alasan di pilihnya lokasi penelitian yaitu di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ponorogo, Rumah Ketua RT yang ada di Kabupaten Ponorogo, Rumah Masyarakat yang ada di Kabupaten Ponorogo, Kantor Tim Pengendali Program Khusus (TP2K)

Kabupaten Ponorogo, Kantor Media/Wartawan Yang terdapat di Kabupaten Ponorogo, Rumah Akademisi terdapat di Kabupaten Ponorogo, Rumah Mahasiswa Yang terdapat di Kabupaten Ponorogo, Rumah Pengurus Partai PDI Perjuangan Dan Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian karena lokasi tersebut merupakan sumber untuk mendapatkan informasi mengenai program kegiatan RT.

### 3. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang sedang di alami oleh subyek penelitian secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan dengan deskripsi pada konteks khusus dengan penggunaan metode alamiah. Subjek penelitian individu, atau organisasi yang digunakan sebagai informasi yang di butuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Orang yang memberikan informasi tentang apa yang ingin diteliti atau istilah yang di namakan informan, informan pertama adalah Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ponorogo, informan kedua adalah ketua RT yang ada di Kabupaten Ponorogo, informan ketiga Tokoh Masyarakat Desa yang ada di Kabupaten Ponorogo, informan keempat Tim Pengendali Program Khusus (TP2K) Kabupaten Ponorogo, informan kelima Media/Wartawan, informan keenam Akademisi, informan ketujuh dari Mahasiswa, informan kedelapan dari Pengurus Partai PDI Perjuangan dan Pengurus Partai Nasdem. Sumber informan adalah pemberi informasi tentang program kegiatan RT yang diperlukan peneliti terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penentuan informan menggunakan metode *Snowball Sampling* untuk memperluas subjek penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang terdapat pada penelitian kualitatif menurut Siyoto & Sodik (2015) yaitu :

### 1. Teknik Observasi

Bila memakai metode observasi cara yang bisa dikatakan efektif adalah dengan memenuhi format atau blangko sebagai alat bantu. Format massal berisikan item tentang peristiwa atau perilaku yang digambarkan terjadi atau dengan menggunakan buku catatan kecil/memo untuk mencatat hasil pengamatan yang dilakukan. Peran terpenting pada saat menggunakan metode observasi adalah pengamatan. Pengamatan harus detail dalam saat observasi seperti mengamati sebuah peristiwa, gerakan atau proses. Dalam penelitian ini peneliti mencatat hal-hal yang berhubungan dengan apa yang peneliti inginkan seperti tentang apa yang menjadi alasan ataupun tujuan adanya program kegiatan RT dan juga terkait pelaksanaan ataupun kendala yang di hadapi saat pelaksanaan program kegiatan RT.

### 2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti guna memperoleh informasi lisan dari percakapan. Semi terstruktur adalah jenis teknik wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan peneliti yang terlebih dahulu tersusun sehingga diperdalam satu per satu untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang topik penelitian yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ponorogo dan ketua RT yang terdapat di beberapa Desa se Kabupaten Ponorogo, Tokoh Masyarakat, Tim Pengendali Program Khusus (TP2K) Kabupaten Ponorogo, Media/Wartawan, Akademisi, Mahasiswa, Pengurus Partai Politik PDI Perjuangan dan Pengurus Partai Politik Demokrat.

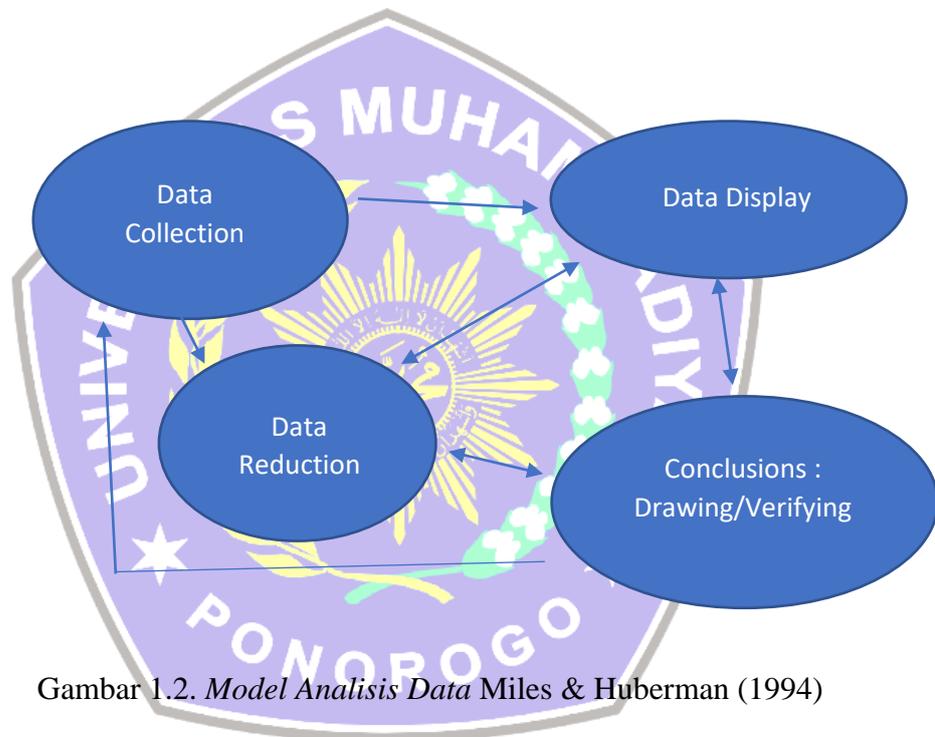
### 3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi mencari data yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, teks, buku, surat kabar, majalah, dll. Dibandingkan dengan metode lain, metode bisa terbilang lebih mudah dari metode yang sebelumnya, artinya jika terjadi kesalahan, sumber data tetap tidak berubah. Dalam penelitian

ini, peneliti mengumpulkan beberapa dokumen pendukung untuk membantu melengkapi penelitian mengenai pelaksanaan program kegiatan RT.

## 5. Metode Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (1994) Menganalisis data kualitatif tidak mudah. Di satu pandangan penelitian kualitatif bersifat subjektif, tetapi disisi lain penelitian dituntut mempertahankan kualitas penelitiannya. Untuk itu dibutuhkan metode analisis data kualitatif yang bisa di pertanggungjawabkan kualitas akademisnya. Hal ini berarti ada perulangan dan keterkaitan antara pengumpulan data dan analisis data.



Gambar 1.2. Model Analisis Data Miles & Huberman (1994)

Berikut ini penjelasan tahapan-tahapan analisis data Miles & Huberman (1994) sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data (*data collection*), data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait program kegiatan RT. Kemudian data yang didapatkan dari lapangan dicatat dalam bentuk catatan lapangan dijelaskan tentang apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialami atau dirasakan subjek penelitian.

- b. Reduksi data (*data reduction*), artinya melemahkan atau menghilangkan sesuatu dalam prosesnya. Karena data yang didapatkan dari lapangan cukup besar, sehingga perlu dicatat secara cermat dan jelas. Data tersebut direduksi dengan membuat ringkasan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan analisis dokumen. Objek utama tersebut kemudian diteliti dan dikelompokkan untuk tema dan pola yang sesuai dengan fokus penelitian tentang program kegiatan RT.
- c. Penyajian data (*data display*). data yang dibuat dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif dari data observasi lapangan terkait penelitian tentang program kegiatan RT. Penyajian data adalah tahap untuk memahami apa yang terjadi dan apa yang perlu dilaksanakan. Pandangan secara umum adalah sekumpulan informasi yang terstruktur dan dari mana kesimpulan dan tindakan dapat ditarik.
- d. Membuat kesimpulan (*conclusion drawing*). Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan bagian dari analisis. Kegiatan ini ialah menarik kesimpulan dan memvalidasi hasil data dengan menggunakan teori yang dipergunakan dalam penelitian. Pada hal ini dilaksanakan dengan cara mendeskripsikan data hasil penelitian dalam pembahasan. Pembahasan dilakukan pada data hasil penelitian dengan teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian.

## 6. Keabsahan Data

Berbagai teknik untuk mencapai keabsahan data dapat di pilih dalam penelitian kualitatif. Selain itu keabsahan data ini yang paling mengerti hanya peneliti itu sendiri, maka peneliti perlu memperlihatkan kejujuran. Manipulasi data akan berakibat keabsahan data menjadi berkurang nilai keilmiahannya (Endraswara, 2006). Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan triangulasi.

Menurut Norman K. Denzin (1978) mendefinisikan triangulasi menjadi sebuah kumpulan atau kolaborasi dari beberapa cara yang digunakan untuk meneliti sebuah fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan kemungkinan yang

berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Namun pada saat penelitian ini mengambil triangulasi metode hal tersebut dilakukan dengan upaya membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian terkait analisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam program kegiatan RT memakai wawancara, observasi, dan survei. Untuk mendapatkan kebenaran informasi yang dapat dipercaya dan gambaran yang lengkap dari beberapa sumber informasi terkait penelitian tersebut, peneliti bisa memakai wawancara atau observasi guna membuktikan kebenarannya. Selain itu, peneliti bisa memilih informan yang berbeda untuk menelusuri kebenaran informasi yang di dapat. Triangulasi tahap ini dilaksanakan apabila data atau informasi yang didapatkan dari informan penelitian diragukan kebenarannya.

